

**FORMAT PENYUSUNAN LKPj
TAHUN ANGGARAN 2019**

A. PROGRAM DAN KEGIATAN

Urusan : Keuangan

OPD Pelaksana : Badan Pengelola Keuangan Daerah

No	Program/ Kegiatan		Belanja (Rp)		
			Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		9.127.426.645	9.038.916.542	99,03
	Kegiatan :				
	1	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	118.342.896	93.586.457	79,08
	2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	327.070.000	306.277.500	93,64
	3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	180.250.000	177.690.500	98,58
	4	Penyediaan alat tulis kantor	62.810.103	61.822.847	98,43
	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40.342.760	19.970.488	49,50
	6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	23.940.000	13.588.694	56,76
	7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	13.900.000	10.250.000	73,74
	8	Penyediaan makanan dan minuman	61.930.000	61.873.900	99,91
	9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	8.205.916.400	8.203.485.064	99,97
	10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	72.112.000	70.507.300	97,77
	11	Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan	20.812.486	19.863.792	95,44
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1.111.590.783	940.757.513	84,63
	1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	534.884.850	491.864.881	91,96
	2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	95.351.618	46.778.409	49,06
	3	Pengadaan peralatan gedung kantor	110.250.000	101.778.000	92,32
	4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	150.472.590	100.881.500	67,04
	5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	175.531.725	158.219.656	90,14
	6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	45.100.000	41.235.067	91,43
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		106.205.799	101.956.292	96,00

	1	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	106.205.799	101.956.292	96,00
4	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		74.998.487	71.066.513	94,76
	1	Penanganan kasus dan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah	74.998.487	71.066.513	94,76
5	Program Pengembangan Data/Informasi		25.000.000	4.268.000	17,07
	1	Penyebarluasan informasi pembangunan	25.000.000	4.268.000	17,07
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		3.125.653.235	2.773.287.801	88,73
	1	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	143.560.364	138.975.316	96,81
	2	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	149.293.395	135.754.200	90,93
	3	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	130.650.495	112.317.026	85,97
	4	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	124.608.879	111.518.250	89,49
	5	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	92.007.678	88.615.076	96,31
	6	Penyusunan laporan realisasi anggaran periodik dan pembinaan laporan keuangan SKPD	325.157.986	293.924.146	90,39
	7	Penunjang bendara umum daerah	872.066.984	859.621.828	98,57
	8	Pengelolaan dana transfer	28.594.739	25.270.806	88,38
	9	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan	126.558.348	124.177.441	98,12
	10	Penyusunan DPA SKPD	68.310.466	68.287.050	99,97
	11	Penyusunan laporan barang milik daerah	166.883.444	153.030.976	91,70
	12	Penyusunan rencana kebutuhan barang dan pemeliharaan	57.874.680	44.165.829	76,31
	13	Penyusunan DPA perubahan SKPD	64.164.587	58.644.652	91,40
	14	Pengelolaan dan penatausahaan kas daerah	55.129.440	52.999.660	96,14
	15	Penunjang sistim informasi pengelolaan keuangan daerah	223.741.464	161.287.450	72,09
	16	Penghapusan barang-barang investaris	60.250.000	42.378.898	70,34
	17	Penyusunan regulasi pengelolaan BMD	41.639.342	12.753.442	30,63

	18	Investarisasi barang	315.161.674	232.886.539	73,89
	19	Pedoman penyusunan RKA	79.999.270	56.679.216	70,85
7	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/kota		24.643.312	20.467.373	83,05
	1	Analisa APBD Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2018	24.643.312	20.467.373	83,05
		Jumlah	13.595.518.261	12.950.720.034	95,26

B. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 9.127.426.645,- realisasi Rp. 9.038.916.542,- (99,03%)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran bertujuan untuk penyediaan kebutuhan jasa, peralatan dan kebutuhan lainnya dalam menunjang operasional perkantoran.

Hasil/keluaran Meningkatnya kinerja ASN dilingkup BPKD dan terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar ASN dalam melaksanakan tugas.

Program ini meliputi kegiatan kegiatan seperti :

- Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.
- Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman.
- Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah.
- Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah.
- Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan.

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 1.111.590.783,- realisasi Rp. 940.757.513,- (84,63%).

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana berupa pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor seperti pemeliharaan gedung tempat kerja, dan bangunan-bangunan pemerintah daerah lainnya, serta pengadaan peralatan kerja seperti kendaraan dinas, komputer, dan lainnya.

Hasil/keluaran menunjang secara maksimal pelaksanaan tugas ASN lingkup BPKD

Program ini dijalankan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional.
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor.
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional.
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 106.205.799,- realisasi Rp. 101.956.292,- (96,00%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan .

Tujuan dari kegiatan ini adalah tersusunnya laporan capaian kinerja dan laporan keuangan semester dan tahunan Pemda Kabupaten Pesisir yang tepat waktu. Keluaran dari kegiatan ini adalah laporan capaian kinerja dan laporan keuangan semester dan tahunan Pemda

Hasil/keluaran memberikan informasi keuangan daerah tepat waktu, relevan ,dapat dimengerti dan Akuntabel dan terlaksananya penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem pelaporan dan capaian kinerja keuangan pada kegiatan

- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

4. Program Pengembangan data/Informasi

Program ini memiliki Pagu Anggaran Rp. 25.000.000,- realisasi Rp. 4.268.000,- (17,07%),

Hasil/Keluarannya terlaksananya Festival Langkisau tiap tahunnya.

5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH ini bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan dalam melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dan Sebagian dari Kerugian Negara Daerah Baik TP maupun TGR sudah disetor/dikembalikan kepada Kas Daerah secara bertahap oleh pegawai atau bendahara atau pihak ketiga.

Program ini memiliki Pagu Anggaran Rp. 74.998.487,- realisasi Rp. 71.066.513,-(94,76%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan.

Hasil/Keluarannya Terlaksananya Penanganan Kasus dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah

6. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 3.125.653.235,- realisasi Rp. 2.773.287.801,- (88,73%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan .

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan

- a. untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan asset/barang daerah di BPKD
- b. penyusunan dokumen-dokumen atau standar pelaksanaan kegiatan keuangan evaluasi pelaksanaan program pembangunan.

Hasil /Keluarannya Terselenggaranyalenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai sesuai target yang telah ditetapkan. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian kekayaan /asset daerah sehingga dapat bernilai ekonomis,berdaya guna dan dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan informasi keuangan daerah tepat waktu,relevan ,dapat dimengerti dan Akuntabel pada kegiatan :

- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
- Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD
- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
- Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD
- Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Periodik dan Pembinaan Laporan Keuangan SKPD
- Penunjang Bendahara Umum Daerah
- Pengelolaan Dana Transfer
- Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- Penyusunan DPA SKPD
- Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan
- Penyusunan DPA Perubahan SKPD
- Pengelolaan dan Penatausahaan Kas Daerah
- Penunjang Sisitim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
- Penghapusan Barang-barang Inventaris
- Penyusunan Regulasi Pengelolaan BMD
- Inventarisasi Barang
- Pedoman Penyusunan RKA

7. Program Pembinaan Dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 24.643.312,- realisasi Rp. 20.467.373,- (83,05%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan .

Hasil/keluaran tersusunnya Administrasi Pengelolaan Keuangan daerah sesuai dengan sistem dan prosedur pada kegiatan

- Analisa APBD Kabupaten Pessel Tahun Anggaran 20178

C PERMASALAHAN DAN SOLUSI

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Prog. Pengembangan Informasi Pembangunan	Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Festival Langkisau	-
2	Prog. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan pemeliharaan	Sisa makan minum rapat, pembahasan di bulan Ramadhan	-
3	Prog. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Sosialisasi integrasi asset ke SIPD tidak jadi karena mapping asset belum selesai 2. PP 12 thn 2019 pada Pengelolaan Keuangan Daerah di undur pada tahun 2020	-
4	Prog. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penghapusan Barng-barang Inventaris	Cetak Regulasi BMD masih tertunda karena belum dib ahs oleh TIM asistensi Bagian Hukum	-
5	Prog. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pedoman Penyusunan RKA	Sosialisasi terlaksana melalui FGD	-

Painan, Januari 2020
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan



SUHANDRI, SE, MM
NIP. 19700608 200212 1 003

FORMAT DATA CAPAIAN MAKRO

TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
OPD PELAKSANA : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

No	Urusan/ Indikator	Satuan	Tahun		Ket
			2018	2019	
1.	Urusan : Keuangan				
	Indikator				
	1. Penilaian LKD (opini BPK)	Opini	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Target dan Capaian WTP	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan target WTP yang mana opini belum keluar oleh BPK, karena masih dalam proses Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Tahun 2019	

Painan, Januari 2020
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan



SUHANDRI, SE. MM
NIP. 19700608 200212 1 003

Form. 1.

SKPD Pelaksana : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Urusan yang dilaksanakan:

A. URUSAN

Jumlah Program sebanyak 7 program dan Kegiatan sebanyak **40** kegiatan.
Rincian Program dan kegiatan :

NO.	URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	BELANJA LANGSUNG										TINGKAT CAPAIAN (%)
		ANGGARAN					REALISASI					
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA PEMELIHARAAN	BELANJA MODAL	TOTAL	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA PEMELIHARAAN	BELANJA MODAL	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5+6)	8	9	10	11	12=(8+9+10+11)	13
URUSAN												
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran												
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	118,342,896	0	0	118,342,896	0	93,586,457	0	0	93,586,457	
2.	Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan	319,150,000	7,920,000	0	0	327,070,000	301,950,000	4,327,500	0	0	306,277,500	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1,250,000	179,000,000	0	0	180,250,000	750,000	176,940,500	0	0	177,690,500	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0	62,810,103	0	0	62,810,103	0	61,822,847	0	0	61,822,847	
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0	40,342,760	0	0	40,342,760	0	19,970,488	0	0	19,970,488	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	23,940,000	0	0	23,940,000	0	13,588,694	0	0	13,588,694	
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0	13,900,000	0	0	13,900,000	0	10,250,000	0	0	10,250,000	
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	0	61,930,000	0	0	61,930,000	0	61,873,900	0	0	61,873,900	
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	0	8,205,916,400	0	0	8,205,916,400	0	8,203,485,064	0	0	8,203,485,064	
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	0	72,112,000	0	0	72,112,000	0	70,507,300	0	0	70,507,300	
11	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	1,000,000	19,812,486	0	0	20,812,486	1,000,000	18,863,792	0	0	19,863,792	

II.	PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0	0	0	534,884,850	534,884,850	0	0	0	491,864,881
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0	0	0	95,351,618	95,351,618	0	0	0	46,778,409
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	0	0	0	110,250,000	110,250,000	0	0	0	101,778,000
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0	30,472,590	0	150,472,590	120,000,000	0	20,981,500	0	100,881,500
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0	175,531,725	0	175,531,725	0	0	158,219,656	0	158,219,656
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	0	45,100,000	0	45,100,000	0	0	41,235,067	0	41,235,067
III.	PROG. PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	65,550,000	40,655,799	0	106,205,799	0	65,000,000	36,956,292	0	101,956,292
IV.	PROG. PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH									
1	Penanganan Kasus dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	63,600,000	11,398,487	0	74,998,487	0	63,600,000	7,466,513	0	71,066,513
V.	PROG. PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI									
1	Penyebarluasan Informasi Pembangunan	0	25,000,000	0	25,000,000	0	0	4,268,000	0	4,268,000
VI.	PROG. PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH									
1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	80,100,000	63,460,364	0	143,560,364	0	79,850,000	59,125,316	0	138,975,316
2	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	77,000,000	72,293,395	0	149,293,395	0	72,250,000	63,504,200	0	135,754,200
3	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	65,600,000	65,050,495	0	130,650,495	0	63,350,000	48,967,026	0	112,317,026
4	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	59,500,000	65,108,879	0	124,608,879	0	58,250,000	53,268,250	0	111,518,250
5	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB D	64,550,000	27,457,678	0	92,007,678	0	61,500,000	27,115,076	0	88,615,076

6	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Periodik dan Pembinaan Laporan Keuangan SKPD	127,200,000	197,957,986	0	0	325,157,986	120,770,000	173,154,146	0	0	293,924,146
7	Penunjang Bendahara Umum Daerah	742,650,000	129,416,984	0	0	872,066,984	734,160,000	125,461,828	0	0	859,621,828
8	Pengelolaan Dana Transfer	0	28,594,739	0	0	28,594,739	0	25,270,806	0	0	25,270,806
9	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan	68,550,000	58,008,348	0	0	126,558,348	68,000,000	56,177,441	0	0	124,177,441
10	Penyusunan DPA SKPD	6,000,000	62,310,466	0	0	68,310,466	6,000,000	62,287,050	0	0	68,287,050
11	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	58,800,000	108,083,444	0	0	166,883,444	54,640,000	98,390,976	0	0	153,030,976
12	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan.	6,000,000	51,874,680	0	0	57,874,680	600,000	43,565,829	0	0	44,165,829
13	Penyusunan DPA Perubahan SKPD	0	64,164,587	0	0	64,164,587	0	58,644,652	0	0	58,644,652
14	Pengelolaan dan Penatausahaan Kas Daerah	30,000,000	25,129,440	0	0	55,129,440	30,000,000	22,999,660	0	0	52,999,660
15	Penunjang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	168,000,000	55,741,464	0	0	223,741,464	142,785,000	18,502,450	0	0	161,287,450
16	Penghapusan Barang-barang Inventaris	8,400,000	51,850,000	0	0	60,250,000	6,300,000	36,078,898	0	0	42,378,898
17	Penyusunan Regulasi Pengelolaan BM D	0	41,639,342	0	0	41,639,342	0	12,753,442	0	0	12,753,442
18	Inventarisasi Barang	5,000,000	110,161,674	0	200,000,000	315,161,674	5,000,000	36,301,739	0	191,584,800	232,886,539
19	Pedoman Penyusunan RKA	15,600,000	64,399,270	0	0	79,999,270	14,400,000	42,279,216	0	0	56,679,216
VII.	PROG.PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA										
1	Analisa APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018	0	24,643,312	0	0	24,643,312	0	20,467,373	0	0	20,467,373
	TOTAL	2,033,500,000	10,501,531,793	0	1,060,486,468	13,595,518,261	1,950,155,000	10,088,658,944	0	911,906,090	12,950,720,034

- A. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
- B. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
- C. Kondisi Sarana Prasarana yang digunakan (lengkap/kurang/mencukupi/lainnya)
- D. Permasalahan dan Solusi
 - 1. Permasalahan:
 - NIHIL
 - 2. Solusi:
- E. Hal-hal yang dilaporkan :
 - NIHIL

SDM Pendukung Program dan Kegiatan:

DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN
PER 31 DESEMBER 2019

No.	Nama/NIP	Kualifikasi Pendidikan terakhir					Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan Pelatihan Struktural (Diklat PIM)			
		SD/ SLTP	SLTA	DIII	S1	S2	LK	PR	I	II	III	IV	I	II	III	IV
ESSELON II.b																
1.	SUHANDRI, SE.MM 19700608 200212 1 003	-	-	-	-	v	v	-	-	-	-	v	-	-	v	V
ESSELON III.a																
2.	SUBCHANDRI, SE, Msi 19720416 199903 1 003	-	-	-	-	v	v	-	-	-	-	v	-	-	v	V
ESSELON III.b																
3.	NESVITA ZIKRA, S.Si, M.Si	-	-	-	-	v	-	v	-	-	-	v	-	-	-	V
4.	MULYANI, SE 19680628 199303 2 005	-	-	-	V	-	-	V	-	-	-	v	-	-	-	V
5.	INTAN NOVIA F NANDA, SE.Ak, MPP,MAP 19841111 200902 2 008	-	-	-	-	v	-	V	-	-	-	v	-	-	-	-
ESSELON IV.a																
6.	EMRI, SH 19640605 199308 1 004	-	-	-	V	-	v	-	-	-	-	v	-	-	-	V
7.	IRNAWATI, SE, MM 19830112 201001 2 022	-	-	-	-	v	-	V	-	-	-	v	-	-	-	V
8.	YULI ASTUTI, SPT 19780712 200701 2 007	-	-	-	V	-	-	V	-	-	-	V	-	-	-	V
9.	WILLY SUSPARELA, SE, MM 19790404 200312 2 005	-	-	-	-	v	-	v	-	-	-	V	-	-	-	V
10.	RAHAYU KURNIA PUTRI, SE 19871116 200604 2 002	-	-	-	V	-	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-
11.	SUS MIYAR DERITA, A.Md 19720111 200312 2 002	-	-	v	-	-	-	V	-	-	-	v	-	-	-	-
12.	LUSIANA, S.Kom, MM 19810406 200902 2005	-	-	-	-	v	-	V	-	-	-	v	-	-	-	-

No.	Nama/NIP	Kualifikasi Pendidikan terakhir					Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan Pelatihan Struktural (Diklat PIM)			
		SD/ SLTP	SLTA	DIII	S1	S2	LK	PR	I	II	III	IV	I	II	III	IV
13.	FITRI HANDAYANI, A.Md 19810803 200501 2 006	-	-	v	-	-	-	V	-	-	v	-	-	-	-	-
14.	ROSZA LESTARI, SE 19780920 200701 2 007	-	-	-	V	-	-	V	-	-	v	-	-	-	-	-
15.	RENI DAHLIA, SE 19730130 200701 2 004	-	-	-	V	-	-	V	-	-	V	-	-	-	-	-
16.	RAHMADI,SAP,M,Si	-	-	-	-	v	V	-	-	-	V	-	-	-	-	-
STAF																
17.	HALJFAH MARYENTI, SE 19800913 201407 2 004	-	-	-	V	-	-	V	-	-	V	-	-	-	-	-
18.	REVI MARTA, SE 19841005 200801 1 001	-	-	-	V	-	v	-	-	-	v	-	-	-	-	-
19.	SUBCHAN KHALID,SE 19800429 200501 1 007	-	-	-	V	-	v	-	-	-	V	-	-	-	-	-
20.	EFRIANTO 19840712 200701 1 003	-	V	-	-	-	v	-	-	v	-	-	-	-	-	-
21.	DASMANELI 19820915 201001 2 025	-	V	-	-	-	-	V	-	v	-	-	-	-	-	-
22.	AGUS SOFIAN 19830808 201001 1 012	-	V	-	-	-	v	-	-	v	-	-	-	-	-	-
23.	DESTI FAJRIANI 19851207 201001 2 029	-	V	-	-	-	-	V	-	v	-	-	-	-	-	-
24.	MARTIO 19840303 201001 1 022	-	V	-	-	-	v	-	-	v	-	-	-	-	-	-
25.	SETIO RINI, SE 19840617 201903 2 003	-	-	-	V	-	-	V	-	-	V	-	-	-	-	-
26.	FADHILAH KHAIRANI,SE 19930630 201903 2 002	-	-	-	V	-	-	V	-	-	V	-	-	-	-	-
27.	RANI MEIRINA.S, SE 19850421 201001 1 026	-	-	-	V	-	-	V	-	-	V	-	-	-	-	-
28.	RIYANTI 19830605 200701 2 002	-	V	-	-	-	-	V	-	v	-	-	-	-	-	-
29.	AFRIZAL 19850421 201001 1 026	-	V	-	-	-	v	-	-	v	-	-	-	-	-	-
30.	ASW ENRIZAL, S.Sos 19760116 200801 1 007	-	-	-	V	-	v	-	-	-	v	-	-	-	-	-
31.	MUHAMMAD ZAKI. E. M.M, SE 1982 1030 201502 1 002	-	-	-	V	-	v	-	-	-	v	-	-	-	-	-
No.	Nama/NIP	Kualifikasi Pendidikan terakhir					Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan Pelatihan Struktural (Diklat PIM)			
		SD/	SLTA	DIII	S1	S2	LK	PR	I	II	III	IV	I	II	III	IV

LAMPIRAN III.1
TATARAN PENGAMBILAN KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Keselarasn dan Efektivitas Hubungan antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintah, serta antara Pemerintahan Daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah	Penyampaian laporan keuangan dan kinerja	10	Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan berdasarkan PP 8/2008	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman : - Laporan Keuangan 2019, disampaikan pada tanggal----- 2020 sesuai surat pengantar Nomor----- tanggal ----- 2020 - Laporan Kinerja tahun 2019, disampaikan pada tanggal-----	Tepat/tidak	Laporan Keuangan 2018 akan disampaikan pada bulan Maret tahun 2019
		Hubungan antar daerah	12	Kerjasama dengan daerah lain atau pihak lain	Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun 2019	Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2019, sebanyak----- MOU yang terdiri dari : Tidak Ada	Tidak ada	
3	Keselarasn antara Kebijakan Pemerintahan Daerah dengan Kebijakan Pemerintah	Keuangan	15	Waktu penetapan PERDA APBD 2019	Tepat atau tidak tepat waktu penetapan PERDA APBD 2019	Apabila Tepat : Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : 09 Tahun 2018 tentang Perda APBD 2019. (Paling lambat tanggal 31 Desember 2018)	Tepat	
			16	Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	Ada atau tidak adanya PERDA ttg pengelolaan keuangan daerah	Apabila Ada : Sebutkan legal formalnya. Perda Nomor : 09 Tahun 2008 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah	Tepat	
			17	Belanja untuk pelayanan dasar	Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi jumlah total belanja x 100%	Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2019. 1 Urusan Pendidikan Rp 127.632.654.530,- 2 Urusan Kesehatan Rp 174.610.948.914,- 3 Urusan PU dan Penataan Ruang Rp194.308.584.771,- 4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp 22.184.417.706,- 5 Urusan Trantibum dan Linmas Rp9.861.124.128,-	31,33%	

					6 Urusan Sosial Rp 1.981.124.128,- Total Belanja pelayanan dasar Rp 530.578.792.256,- Total Belanja APBD 2019 sebesar Rp 1.693.640.789.061,71,-		
				18	Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	Jumlah belanja untuk kesehatan dan pendidikan dibagi jumlah total belanja x 100%	17,85%
						Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2019. 1 Urusan Pendidikan Rp 127.632.654.530,- 2 Urusan Kesehatan Rp 174.610.948.914,- Total Belanja Pendidikan dan Kesehatan Rp 302.243.603.444,-	
9	Transparansi Dalam Pemanfaatan Alokas, Pencairan dan Penyerapan DAU, DAK dan Bagi Hasil	Serapan dana perimbangan		31	Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan x 100%	97,78%
		Alokasi Belanja pada APBD dari DAU		32	Belanja Publik terhadap DAU	Jumlah belanja publik dibagi DAU x 100%	84,19%
		Alokasi Belanja pada APBD		33	Belanja Langsung terhadap total APBD	Total belanja langsung dibagi APBD x 100%	42,88%
10	Intensitas, Efektivitas dan Transparansi Pemungutan Sumber-sumber PAD dan Pinjaman/Obligasi Daerah	Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)		34	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD (Realisasi)	Jumlah PAD dibagi jumlah total pendapatan APBD (realisasi) x 100%	7,95%
11	Efektivitas Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha, Pertanggungjawaban dan Pengawasan APBD	Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)		35	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Jenis Opini BPK terhadap hasil Lapkeu daerah untuk 2 (dua) tahun terakhir	Opini tahun 2018= WTP Opini tahun 2019= WTP
		Besaran SILPA		36	Rasio SILPA terhadap total pendapatan	Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100%	1.00%
		Realisasi Belanja		37	Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja	Realisasi belanja dibagi total anggaran belanja APBD x 100%	91,70%

12	Pengelola Potensi Daerah	Peta Potensi Daerah	39	Rasio realisasi PAD 2019 terhadap potensi PAD	Jumlah realisasi PAD 2019 dibagi dengan potensi PAD x 100%	- Total Anggaran Belanja dalam APBD Tahun 2019, sebesar Rp 1.846.923.981.831,39,- - Realisasi PAD Tahun 2019, sebesar Rp 135.032.868.843,43,- - Potensi PAD pada APBD Tahun 2019 Rp 153.941.080.200,-	87,72%	
		Peningkatan PAD	40	Peningkatan PAD	Kenaikan/penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu x 100% (PAD 2019:PAD 2018) : PAD 2018 X 100%	- Total PAD pada Tahun 2019 sebesar Rp 135.032.868.843,43,- - Total PAD pada tahun 2018 sebesar Rp 123.906.524.443,36,-	108,98%	
13	Terobosan/Inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Penghargaan	41	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2019	Jumlah Penghargaan dari Pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam tahun 2019	Penghargaan yang diterima, sebanyak 1 yang terdiri dari OPINI WTP	1 Penghargaan	

LAMPIRAN III.2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN : PESIR SELATAN
NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
URUSAN YANG DILAKSANAKAN :
1. URUSAN KEUANGAN

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						(7) Urusan Keuangan	(8) Urusan Inspektorat	(9) Keuangan	(10) Inspektorat
1	Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Anggaran Rp. 3.125.653.235,- dan Realisasi Rp. 2.773.287.801,- 2 Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota dengan Anggaran Rp. 24.643.312,- dan Realisasi Rp. 20.467.373,-	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan Anggaran Rp. 74.998.487,- dan Realisasi Rp. 71.066.513,-		
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen/LPNK		2	Keberadaan standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	SOP BPKD ada sebanyak 33 yang terdiri dari : 1 Prosedur Kenaikan Gaji Berkala 2 Prosedur Surat Keluar 3 Prosedur Surat Masuk 4 Prosedur Nota Dinas 5 Prosedur Pengadaan Barang Inventaris 6 Prosedur Pemakaian Barang 7 Prosedur Pengajuan Perawatan Peralatan 8 Prosedur Penertiban Aset 9 Prosedur Penghapusan Aset 10 Prosedur Penyampaian Realisasi Fisik Kegiatan & Keuangan Per Bulan 11 Prosedur Penyusunan LAKIP 12 Prosedur Penyusunan LKPJ 13 Prosedur Penyusunan LPPD 14 Prosedur Penyusunan RKA 15 Prosedur Renstra 16 Prosedur Pengentrian Data Keuangan pada SIPKD 17 Prosedur Pembayaran Gaji Pegawai 18 Prosedur Pembayaran Dana UP, GU, TU	SOP BPKD ada sebanyak 33 yang terdiri dari : Prosedur Kenaikan Gaji Berkala Prosedur Surat Keluar Prosedur Surat Masuk Prosedur Nota Dinas Prosedur Pengadaan Barang Inventaris Prosedur Pemakaian Barang Prosedur Pengajuan Perawatan Peralatan Prosedur Penertiban Aset Prosedur Penghapusan Aset Prosedur Penyampaian Realisasi Fisik Kegiatan & Keuangan Per Bulan Prosedur Penyusunan LAKIP Prosedur Penyusunan LKPJ Prosedur Penyusunan LPPD Prosedur Penyusunan RKA Prosedur Renstra Prosedur Pengentrian Data Keuangan pada SIPKD Prosedur Pembayaran Gaji Pegawai Prosedur Pembayaran Dana UP, GU, TU	33 SOP	33 SOP

2	Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau Tidak Ada	19 Prosedur Tunjangan Daerah 20 Prosedur Pencairan GU 21 Prosedur Pencairan Dana Kegiatan Langsung (LS) 22 Prosedur Pencairan Dana TU 23 Prosedur Pencairan UP 24 Prosedur Penyusunan Analisa Standar belanja 25 Prosedur Penyusunan Perda APBD dan Perbup Tentang Penjabaran APBD 26 Prosedur Penyusunan Perda Perubahan APBD dan Perbup tentang Perubahan Penjabaran APBD 27 Prosedur Penyusunan Anggaran Hibah 28 Prosedur Penerbitan SP2D UP/GU/TU/LS/LS 29 Prosedur Penatausahaan Kas Daerah 30 Prosedur Surat Rekomendasi 31 Prosedur Pengelolaan dan Penatausahaan gaji 32 Prosedur Pengadministrasian Kendaraan dinas 33 Rekonsiliasi Data Keuangan	Prosedur Tunjangan Daerah Prosedur Pencairan GU Prosedur Pencairan Dana Kegiatan Langsung (LS) Prosedur Pencairan Dana TU Prosedur Pencairan UP Prosedur Penyusunan Analisa Standar belanja Prosedur Penyusunan Perda APBD dan Perbup Tentang Penjabaran APBD Prosedur Penyusunan Perda Perubahan APBD dan Perbup tentang Perubahan Penjabaran APBD Prosedur Penyusunan Anggaran Hibah Prosedur Penerbitan SP2D UP/GU/TU/LS/LS Prosedur Penatausahaan Kas Daerah Prosedur Surat Rekomendasi Prosedur Pengelolaan dan Penatausahaan gaji Prosedur Pengadministrasian Kendaraan dinas Rekonsiliasi Data Keuangan	Ada	Tidak Ada
3	Penataan Kelembagaan Daerah	Pengisian Struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Rasio struktur jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 16 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 16	Jabatan yang terisi sebanyak 2 Jabatan yang harus ada, sebanyak 2	100%	100%
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat daerah	Apabila ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional tidak ada	Apabila ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional tidak ada		
4	Pengelolaan Kepegawaian Daerah	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan , sebanyak 33 Personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 6801 personil	PNS yang menangani urusan , sebanyak 2 Personil Total PNS Kabupaten, sebanyak 6801 personil	48.52%	2.94%
			7	rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 9 org - Pejabat yang ada sebanyak 16 org	Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak - Pejabat yang ada sebanyak 2 org	50.00%	0.00%
				Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan	- Pejabat yang memenuhi kepegangatan, sebanyak 16 org	Pejabat yang memenuhi kepegangatan, sebanyak 2 org	100%	100%

			8	kepengkatan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- jabatan yang ada sebanyak 16 pejabat	Jabatan yang ada sebanyak 2 pejabat		
5	Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah, - RENSTRA Perangkat Daerah, - RENJA Perangkat Daerah, - RKA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 4 jenis yang terdiri dari : RENJA, RENSTRA, RKA,DPA	Apabila ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 4 jenis yang terdiri dari : RENJA, RENSTRA, RKA,DPA	4 jenis dokumen
		Sinkronisasi Program RENJA PD dengan Program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 6 program Jumlah Program dalam Renja yang di tetapkan sebanyak 6 Program	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 1 program Jumlah Program dalam Renja yang di tetapkan sebanyak 1 Program	100%	100%
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 Program - Program dalam RKA Perangkat Daerah sebanyak 6 Program	Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 1 Program Program dalam RKA Perangkat Daerah sebanyak 1 Program	100%	100%
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 Program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 Program	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 1 Program Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 1 Program	100%	100%
6	Pengelolaan Keuangan Daerah	Alokasi Anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp. 74.998.487,- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.846.923.981.831,39,-	Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp. 74.998.487,- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.846.923.981.831,39,-	0,00%
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah		Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Daerah	Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp. 71.066.513,-	Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp. 71.066.513,-	0,00%

7	Pengelolaan Barang Milik Daerah		14	Realisasi belanja APBD	Belanja APBD x 100%	- Total realisasi Belanja APBD, sebesar Rp. 1.693.640.789.061,71,-	Total realisasi Belanja APBD, sebesar Rp. 1.693.640.789.061,71,-		
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 12.879.653.521,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 12.950.720.034,-	Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 71.066.513,- Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 12.950.720.034,-	99,45%	0,58%
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 8.576.839.975,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 12.950.720.034,-	Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 8.576.839.975,- Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 12.950.720.034,-	66,23%	66,23%
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila ada, Laporan Keuangan ada sebanyak 3 Jenis sbb: 1 Neraca 2 CALK 3 LRA	Apabila ada, Laporan Keuangan ada sebanyak 3 Jenis sbb: Neraca CALK LRA	Ada 3 jenis	Ada 3 jenis
8	Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat	Manajemen Asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan Inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila ada, sebutkan jenis dokumennya : KIB B,C,E	Apabila ada, sebutkan jenis dokumennya : KIB B,C,E	Ada	Ada
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100%	- Aset yang tidak digunakan sebesar Rp 0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp. 14.193.248.563,-	Aset yang tidak digunakan sebesar Rp 0,- Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp. 14.193.248.563,-	0	0
		Bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas/prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil Keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas/prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya 1 Papan Pengumuman	Sebutkan Jenisnya Papan Pengumuman	Jumlah sebanyak 1 jenis	Jumlah sebanyak 1 jenis
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Apabila ada, sebutkan survey kepuasan tentang (tidak ada)	Apabila ada, sebutkan survey kepuasan tentang (tidak ada)	tidak ada	tidak ada

LAPIRAN III.3
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

No	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
	BPKD	3	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan -----x100% Jumlah APBD	%	BPKD
		4	Rasio PAD	Jumlah PAD-----x100% Jumlah PDRB non migas	%	BPKD
		5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan - transfer expenditures-----x100% Total belanja APBD dikurangi satu	%	BPKD
		13	Budget execution : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi-----x100% total belanja APBD dikurangi satu	%	BPKD
		14	Asset management	1. Apakah ada daftar asset tetap? ya 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? ya 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan ? ya 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? ya	%	BPKD BPKD BPKD BPKD
		15	Cash management : rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai Realisasi SILPA Rp. 25.065.543.766,89,- dibagi Total belanja Anggaran tahun sebelumnya Rp. 1.569.020.950.588,95,- x 100%	1.60%	BPKD

RINGKASAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
(Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan,
Penelitian dan Pengembangan dan fungsi penunjang lainnya)

1. Perangkat Daerah Pelaksana : BPKD Pesisir Selatan
2. Program dan Kegiatan : 7 Program, 40 Kegiatan
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pegawai = 33 orang

Kualifikasi Pendidikan = S2 : 8
S1 : 14
D3 : 2
SMA : 9

Pangkat dan Golongan = Pembina Tk I / IV b : 1
Pembina IV / a : 1
Pembina Tk I / III d : 3
Penata / III c : 9
Penata Muda Tk I / III b : 4
Penata Muda / III a : 6
Penata Muda Tk I / II d : 3
Pengatur / II c : 6

Jumlah Pejabat Struktural

- Kepala Badan
- Sekretaris
- Kabid Anggaran
- Kabid Perbendaharaan
- Kabid Barang Milik Daerah Dan Akuntansi
- Kasubag. Umum dan Kepegawaian
- Kasubag. Perenc, Keuangan dan Pelaporan
- Kasubbid Evaluasi Anggaran
- Kasubbid Penyusunan Anggaran
- Kasubbid Perenc & Kebijakan Anggaran
- Kasubbid Perbendaharaan dan Verifikasi
- Kasubbid Sistim Informasi Keuangan Daerah
- Kasubbid Pengelolaan kas Umum Daerah
- Kasubbid Perencanaan dan Pengendalian BMD
- Kasubbid Penatausahaan dan Pelaporan BMD
- Kasubbid Akuntansi

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran : Alokasi Rp. 13.595.518.261 dan Realisasi Anggaran Rp. 12.950.720.034
5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah : Telah Sesuai
6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya) : Mencukupi
7. Permasalahan dan Solusi : Nihil
8. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan : Opini WTP

Painan, Januari 2020
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan



SUHANDRI, SE. MM
NIP. 19700608 200212 1 003

KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

- A. A. SKPD Pelaksana :
- B. Forum Koordinasi :
- C. Materi Koordinasi :
- D. Instansi Vertikal yang terlibat :
- E. Sumber dan Jumlah anggaran :
- F. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang dilaksanakan :
- G. Hasil dan Manfaat Koordinasi :
- H. Tindak lanjut Hasil Koordinasi :
- I. Hal lain yang dianggap perlu dilaporkan :
- J. SDM Pendukung Program dan Kegiatan :
 - a. Jumlah Pegawai
 - b. Kualifikasi Pendidikan
 - c. Pangkat atau Golongan
 - d. Jumlah Pejabat Struktural

Painan, Januari 2020
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan


SUHANDRI, SE. MM
NIP. 19700608 200212 1 003

KERJASAMA ANTAR DAERAH

SKPD Pelaksana :
Bidang :

1. Daerah yang diajak kerjasama
2. Dasar hukum

Sebutkan dasar hukum penyelenggaraan kerja sama dengan daerah dimaksud. Nomor, tanggal dokumen perjanjian/MOU/dll.

3. Nama Program dan Kegiatan
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, pangkat dan Golongan (Pegawai yang menangani kerjasama)
5. Sumber dan Jumlah Anggaran
6. Jangka Waktu Kerjasama
7. Hasil (Output) dari Kejasama
8. Permasalahan dan Solusi
9. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Painan, Januari 2020

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan



SUHANDRI, SE. MM

NIP. 19700608 200212 1 003

KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

SKPD Pelaksana :
Tabel Program dan kegiatan :

NO	BIDANG KERJASAMA	ANGGARAN		SKPD PELAKSANA	TINGKAT CAPAIAN (%)	PROSES PERENCANAAN	KONDISI SARANA DAN PRASARANA YG DIGUNAKAN (LENGKAP/ CUKUP/ MODIFIKASI)
		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)				
1	Program.....						
1	Kegiatan						
2	Dst						
iii	Program						
1.	Kegiatan.....						
2	Dst						
	Total						

- A. Mitra yang diajak Kerjasama
- B. Dasar Hukum
- C. Bidang kerjasama
- D. Nama Kegiatan
- E. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga
- F. Jumlah Pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan
- G. Sumber dan jumlah anggaran
- H. Jangka waktu kerjasama
- I. Hasil (Output) dari kerjasama
- J. Permasalahan dan solusi

1. Permasalahan

2. Solusi

TUGAS PEMBANTUAN

SKPD Pelaksana:.....

I. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

Bidang

- A. Dasar Hukum
- B. Instansi Pemberi Tugas
- C. SKPD Pelaksana
- D. Program dan Kegiatan
- E. Realisasi Pelaksanaan Program dan Keg
- F. Sumber d Jumlah Anggaran yang digunakan
- G. SDM Pendukung program dan kegiatan : (jumlah, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional)
- H. Kondisi Sarana dan prasarana yang digunakan (lengkap, kurang, mencukupi, dsb)
- I. Permasalahan dan Solusi
- J. Hal-hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan
- K. Tabel Program dan Kegiatan

NO	BIDANG KERJASAMA	ANGGARAN		SKPD PELAKSANA	TINGKAT CAPAIAN (%)	PROSES PERENCANAAN	KONDISI SARANA DAN PRASARANA YG DIGUNAKAN (LENGKAP/ CUKUP/ MODIFIKASI)
		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)				
1	Program.....						
1	Kegiatan						
2	Dst						
iii	Program						
							
1.	Kegiatan.....						
2	Dst						
	Total						

II. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN (Kabupaten kepada Kecamatan atau Nagari)

- 1. Dasar Hukm
- 2. Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan melalui tugas pembantuan kepada Kabupaten/Kota dan Desa untuk Propinsi atau kepada Desa untuk Kabupaten/Kota
- 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
- 4. SDM Pendukung
- 5. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan